

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno, 2017. Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik (edisi 5- buku 2). Salemba Empat. Jakarta
- Anantawikrama, Komang, 2017. Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, vol. 12, No 1
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Detik.com 2018 Jokowi naikan Anggaran Dana Desa jadi 73 triliun. Diperoleh 21 Oktober 2018 dari <https://amp.dw.com/id/jokowi-naikkan-anggaran-dana-desa-jadi-73-triliun/a-45958813>
- Fitrawan, Aliamin, Heru, 2017. Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, vol.3 no 2
- Indonesia (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme
- Indonesia (2007). Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Indonesia (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Indonesia (2014). Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengertian Desa

Kebumenekspres.com 2017 Korupsi Dana Desa semakin berbahaya. Diperoleh 22 oktober 2018 dari <http://www.kebumenekspres.com/2017/04/korupsi-dana-desa-semakin-berbahaya.html?m=1>

Komite Akuntansi pemerintahan (KSAP), 2017. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa. <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-desa>

Ni wayan, 2016. *Good governance* dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Simposium Nasional Akuntansi xix, Lampung

Sedarmayanti, 2017. Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja. Refika Aditama. Bandung

Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods). Alfabeta. Bandung

Tuanakotta Theodorus M, 2010. Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Salemba Empat. Jakarta

Yuliansyah, Munandar, 2017. Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 di wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, vol. 5 No 2